



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **UMBU JAMA**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **6175**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.562.432.000**

1. Tanah Seluas 9432 m2 di SUMBA TENGAH, WARISAN Rp. 90.432.000
2. Tanah Seluas 155 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 177 m2/140 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 24000 m2 di SUMBA TENGAH, WARISAN Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 82200 m2 di SUMBA TENGAH, WARISAN Rp. 822.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 195.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA VIOS SEDAN Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
4. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 50.760.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.322.416.210
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.130.608.210
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.130.608.210

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **10 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.